TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Disusun Oleh :
WITA OKTADEANTI
NIM 3.16.08.002

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan bentuk terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Korban perdagangan orang diperlakukan seperti barang dagangan, diperjual-belikan, dipindahkan, serta dirampas hak asasi bahkan beresiko pada kematian. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu kondisi yang dialami oleh keluarga Rika dan Taufik (bukan nama sebenarnya dan merupakan pasangan suami istri), yang terpaksa menjual anak yang masih dalam kandungan dimana usia kandungan Rika baru menginjak delapan bulan. Rika dan Suami menawarkan kepada tetangga terlebih dahulu dan sudah ada yang berani membayar anak yang masih dalam kandungan tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Alasan warga Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara yang menjual anak yang masih dalam kandungan adalah karena alasan kemiskinan. Selain itu, kondisi pasangan suami-istri ini yang tidak mempunyai biaya persalinan untuk melahirkan anak, serta untuk membayar utang kontrakan rumah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menebus ijazah serta sertifikat pelaut suami Rika yang baru dipecat. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menyelesaikan perdagangan anak yang masih dalam kandungan, serta mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menyelesaikan perdagangan anak yang masih dalam kandungan belum efektif karena penegak hukum tidak menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mulai dari kendala hukum berupa kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap undang-undang dalam menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus. Seperti tidak menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap kasus yang dialami oleh Rika dan suaminya.

THE JURIDICAL REVIEW TOWARDS UNBORN CHILD TRAFFICKING CONNECTED TO UNDANG-UNDANG NO 21/2007 ABOUT HUMAN TRAFFICKING ERADICATION

WRITTEN BY:

WITA OKTADEANTI

NIM 3.16 08 002

ABSTRACT

Human trafficking is a modern form from human slavery and the worst form towards human dignity violation. The victims of human trafficking is threaten like a goods, sale, moved, the rights was deprived even risk to death. For example a condition undergone by Rika and Taufik family (fake name), forcefully sell their eight months unborn child. Rika and Husband offer to the neighbor and the buyer buy with price 1.000.000 rupiahs. The reason why the citizen of Beting Village, Koja, and North Jakarta sell their child is because of poverty. Besides that, the condition of this spouse is unable to pay childbirth cost and to pay rent house amounting 550.000 rupiahs and to take certificate of his husband that has recently been fired from his job. The problem concerned by the writer is about affectivity of UU *no 21/2007 about unborn child trafficking eradication, and about the obstacles faced during implementation of* UU *no 21/2007 about human trafficking eradication.*

The study is descriptive analytic by describing facts in form of primary and secondary data with juridical normative approach. The gained data is analyzed in juridical qualitative, therefore hierarchy of constitutions rule can be noticed and legal certainty guaranteed.

According to study result, it can be concluded that the implementation UU *no 21/2007 about human trafficking eradication to solve unborn child trafficking has not effective yet because law enforcement not applicable Articles 11* UU *no 21/2007 about human trafficking eradication. The obstacles faced during implementation* UU *no 21/2007 about human trafficking eradication start at law obstacles such as low knowlage from law enforcement that uu in applicable Articles which problem. Like that, not applicable Articles 11* UU *no 21/2007 about human trafficking eradication that problem undergone by Rika his husband.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan segala rahmat dan karunian-Nya, shalawat serta salam semoga tercurahkan limpahkan kepada Nabi besar kita Muhamad S.A.W., berkat taufik dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi dengan judul : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG".**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan tugas penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun sistematika pembahasan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga kiranya masih banyak yang perlu didalami dan di perbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan di kemudian hari.

Proses menyelesaikan tugas skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh Karena itu penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Prof. Dr. H.R Otje Salman Soemadiningrat, S.H. dan Febilita Wulan Sari, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam

menyelesaikan tugas skripsi ini, selain itu juga dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, S.E., M.S., Ak., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Moh. Tajuddin, M. A., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Ibu Dr. Dra. Hj. Aelina Surya, selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali angkatan 2008 sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Bapak Budi Fitriadi Supriadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

10. Yth. Bapak Asep Iwan Irawan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Ibu Farida Yulianti, S.H., S.E., M.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Ibu Rachmani Puspitadewi., S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
13. Yth. Ibu Yani Brilyani Tavipah., S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
14. Yth. Bapak Dr. Sigid Suseno., S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
15. Yth. Ibu Rika Rosilawati, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
16. Yth. Bapak Muray Selaku Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kompter Indonesia;
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya;

Tidak lupa ucapan terimaksih untuk orang-orang terdekat Penulis seperti Dian Mardiana dan Nurjanah yang selalu mendukung serta memberi semangat dalam menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini serta untuk Kodota ikan peliharaan tercinta yang selalu menemani disaat penulisan skripsi berlangsung.

Terpenting ucapan terimaksih yaitu untuk Mamah Titi Rohaeni dan Bapak Dedi selaku orang tua tercinta serta adik tersayang yaitu Winda Yulianda.

Akhir kata, semoga segala pengorbanan yang diberikan oleh mamah dan bapak tercinta, baik moril maupun materil kepada Penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta berada dalam Perlindungan-Nya. Semoga tugas penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Wassalammualaikum.wr.wb.

Bandung, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

MOTTO

KATA PENGANTAR ……..……..... i

DAFTAR ISI…….……..... v

ABSTRAK……..……..……. vii

***ABSTRACT*……..……..……... viii**

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1
B. Identifikasi Masalah..... 6
C. Tujuan Penelitian..... 6
D. Kegunaan Penelitian..... 7
E. Kerangka Pemikiran..... 7
F. Metode Penelitian..... 21

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERDAGANGAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN..... 26

A. Tinjauan Umum Tantang Anak..... 26
B. Pengertian Umum Tentang Perdagangan Orang..... 31
C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 36
D. Aspek-Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 42

BAB III PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK..... 55

A. Kasus Penjualan Anak..... 55
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Anak..... 59
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak..... 65

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN..... 75

A. Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Menyelesaikan Perdagangan Anak Yang Masih Dalam Kandungan..... 75
B. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 82

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 86

A. Simpulan..... 86
B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA..... ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... xii
LAMPIRAN